

TESIS

**UPAYA PEMERINTAH DALAM MENCEGAH DAN
MENYELESAIKAN PERUNDUNGAN SIBER DI INDONESIA**

**Untuk Memenuhi Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Magister Hukum
Pada Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya**



Oleh:

KHARISUDIN

NPM: 18310030

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
2021**

**TESIS
UPAYA PEMERINTAH DALAM MENCEGAH DAN
MENYELESAIKAN PERUNDUNGAN SIBER DI INDONESIA**

DIAJUKAN OLEH :

KHARISUDIN

NPM: 18310030

TESIS INI TELAH DISETUJUI UNTUK DIUJI

Tanggal, 2 Juni 2021

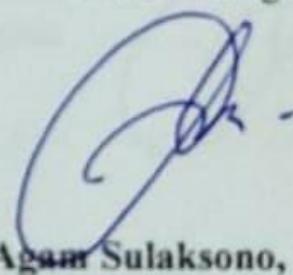
Oleh :

Pembimbing I



Dr. Dwi Tatak Subagiyo, S.H., M.Hum.

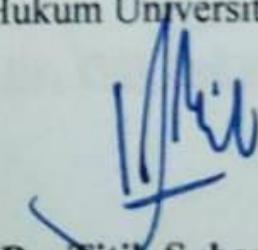
Pembimbing II



Dr. Agus Sulaksono, S.H., M.H.

Mengetahui

Ketua Program Studi Magister Hukum
Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya



Dr. Titik Suharti, S.H., M. Hum.

TESIS

**UPAYA PEMERINTAH DALAM MENCEGAH DAN
MENYELESAIKAN PERUNDUNGAN SIBER DI INDONESIA**

Dipersiapkan dan disusun oleh:
KHARISUDIN
NPM: 18310030

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada Tanggal: 19 Juni 2021

Susunan Dewan Penguji

Nama Penguji

1. Dr. Edi Krisharyanto, S.H., M.H.
2. Dr. Ari Purwadi, S.H., M.Hum.
3. Dr. Dwi Tatak Subagiyo, S.H., M.Hum.
4. Dr. Agam Sulaksono, S.H., M.H.

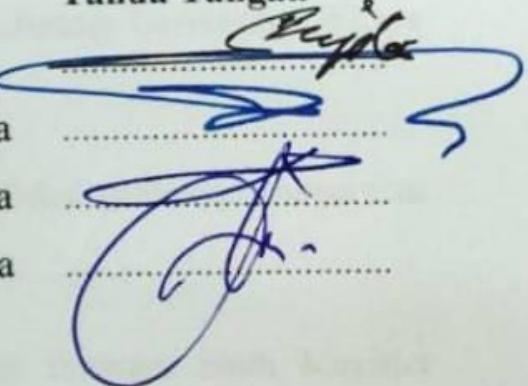
Ketua

Anggota

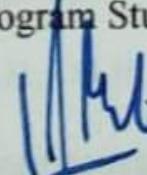
Anggota

Anggota

Tanda Tangan



Tesis ini diterima sebagai salah satu persyaratan
untuk memperoleh gelar Magister Hukum
Tanggal, 19 Juni 2021
Ketua Program Studi Magister Hukum



Dr. Titik Suharti, S.H., M. Hum.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karuniaNya, memberikan kekuatan, kesehatan, kemampuan serta daya kreatif kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “UPAYA PEMERINTAH DALAM MENCEGAH DAN MENYELESAIKAN PERUNDUNGAN SIBER DI INDONESIA” dengan baik dan tepat waktu.

Peneliti mengakui bahwa tesis ini tidak akan selesai tanpa pihak-pihak yang telah memberikan bantuan dan saran serta memberikan andil yang cukup besar, baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu peneliti ingin menghaturkan rasa terima kasih yang mendalam kepada:

1. Prof. Sri Harmadji, dr. Sp. THT. KL (K) selaku Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
2. Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum, Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
3. Dr. Titik Suharti, S.H., M.Hum., Selaku Ketua Program Studi Magister Hukum.
4. Dr. Tatak Dwi Subagyo, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan dorongan dengan penuh kesabaran.
5. Dr. Agam Sulaksono, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang juga dengan penuh perhatian memberikan bimbingan.

6. Para Dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberikan ilmu serta wawasan yang bermanfaat selama pendidikan.
7. Istri tercinta Pusvyta Sari, M.Pd. dan Ananda Hananiyah Satyawati yang telah memberikan dorongan semangat hingga terselesaikannya penyusunan tesis ini.
8. Bapak dan Emak yang dengan support dan do'anya memberikan motivasi dalam penyusunan tesis ini.
9. Saudara-saudara seperjuangan di Program Studi Magister Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, kalian semua luar biasa.

Penulis menyadari kalau tesis ini masih banyak kekurangan yang perlu disempurnakan, oleh karena itu kritik dan saran dari berbagai pihak sangat diharapkan karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan peneliti.

Harapan penyusun semoga tesis ini berguna dan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang memerlukannya serta dapat menjadikan penyusun dapat lebih aktif dalam menulis karya ilmiah berikutnya.

Surabaya, Juni 2021

Kharisudin

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **KHARISUDIN**

NPM : 18310030

Alamat : Warulor Paciran Lamongan Jawa Timur

No. Telp (HP) : 085 655 414 060

Menyatakan bahwa tesis yang berjudul “UPAYA PEMERINTAH DALAM MENCEGAH DAN MENYELESAIKAN PERUNDUNGAN SIBER DI INDONESIA” adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain.

Apabila ternyata nantinya tesis tersebut ditemukan adanya unsur plagiarisme maupun autoplagiarisme, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuhan oleh fakultas.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus di junjung tinggi di lingkungan perguruan tinggi.

Surabaya, Juni 2021
Yang Menyatakan,



KHARISUDIN
NPM. 18310030

DAFTAR ISI

HALAMAN

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN	
HALAMAN PERSETUJUAN	
KATA PENGANTAR	i
PERNYATAAN ORISINILITAS	iii
DAFTAR ISI	iv
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
BAB I PENDAHULUAN	
1. Latar Belakang Masalah	1
2. Rumusan Masalah	12
3. Tujuan Penelitian	12
4. Manfaat Penelitian	12
5. Metode Penelitian	13
A. Jenis Penelitian	13
B. Pendekatan Masalah	14
C. Sumber Bahan Hukum	14
6. Kajian Teoritis	15
A. Teori Keadilan	16
B. Teori Kemanfaatan	19
C. Teori Kepastian Hukum	22
7. Sistematika Penulisan Tesis	24
BAB II BENTUK DAN AKIBAT PERUNDUNGAN SIBER DI INDONESIA	
1. Perundungan siber	27
2. Bentuk perundungan siber di Indonesia	39
3. Dasar hukum perundungan siber	48
4. Subyek hukum perundungan siber	51
5. Bentuk perundungan siber dalam Undang-Undang ITE	54

BAB III UPAYA PEMERINTAH DALAM MENCEGAH DAN MENANGGULANGI PERUNDUNGAN SIBER DIKAITKAN DENGAN KONSEP KEADILAN

1. Hukum siber di Indonesia	61
2. Upaya pemerintah dalam mengatasi perundungan siber di Indonesia	75
3. Upaya pencegahan perundungan siber	79
4. Upaya penanggulangan perundungan siber	83

BAB IV PENUTUP

1. Kesimpulan	87
2. Saran	87

DAFTAR BACAAN

ABSTRAK

Globalisasi yang ada tidak hanya pada sektor ekonomi saja, akan tetapi juga melanda kehidupan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam hal ini dikenal dengan *cyberspace*. Munculnya media sosial mengubah berbagai macam tatanan yang pada mulanya sangat sukar dicapai media konvensional, salah satu dari hal ini adalah gerakan sosial. Kecanggihan teknologi disadari atau tidak sudah sangat membantu pekerjaan manusia, selain itu juga muncul pula beberapa macam kejahatan-kejahatan baru dengan menggunakan kecanggihan teknologi. Penelitian menunjukkan kalau pada mulanya perundungan terjadi hanya pada fisik, namun seiring dengan berkembangnya teknologi perundungan terjadi dan melebar tidak hanya pada aspek fisik akan tetapi bentuk perundungan itu semakin melebar yang juga merambah pada verbal dan atau psikologi yang pelaksanaannya dilakukan di dunia maya.

Penelitian yang digunakan dalam penyusunan tesis ini adalah penelitian hukum normatif, dengan menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier. Dalam penelitian ini penyusun juga menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan yuridis normatif.

Perundungan siber dalam realitas merupakan perbuatan pidana baru yang dalam hal ini pemerintah Indonesia mengatur dengan jelas dengan ketentuan-ketentuan hukum yang ada dan berlaku sebagai bentuk upaya dalam menyelesaikannya. Dengan hadirnya UU RI Nomor 11 Tahun 2008 yang dirubah dengan UU RI Nomor 19 Tahun 2016 maka jelas sudah bahwa perbuatan perundungan siber merupakan salah satu perbuatan pidana yang tidak hanya diatur sanksi hukumnya dalam KUHP.

Beberapa kasus siber yang terjadi salah satunya adalah perundungan siber menjadi bahan dalam penyusunan tesis ini yang diharapkan dapat menjadi rujukan baik secara akademis maupun secara praktis, karena dalam realita penerapan hukum yang masih jauh dari harapan keadilan.

Kata kunci : Hukum Siber, UU ITE, Perundungan Siber, KUHP

ABSTRACT

Globalization that exists not only in the economic sector, but also affects the life of science and technology, in this case known as cyberspace. The emergence of social media has changed various kinds of structures which at first were very difficult to achieve by conventional media, one of which is the social movement. Whether or not technological sophistication is aware of it is very helpful for human work, besides that, several kinds of new crimes have also emerged using technological sophistication. Research shows that initially bullying occurs only in physical matters, but along with the development of technology, bullying occurs and it spreads not only to the physical aspect, but the form of bullying has widened which also penetrates verbal and / or psychology, which is carried out in cyberspace.

The research used in the preparation of this thesis is normative legal research, using primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. In this study the compilers also used a statute approach, a conceptual approach, and a normative juridical approach.

Cyber bullying in reality is a new criminal act, in which the Indonesian government clearly regulates the existing legal provisions and acts as an effort to solve it. With the presence of RI Law Number 11 of 2008 which was amended by Law of the Republic of Indonesia Number 19 of 2016, it is clear that cyber bullying is a criminal act that is not only regulated by legal sanctions in the Criminal Code.

Some of the cyber cases that have occurred include cyber bullying as material in the preparation of this thesis which is expected to be a reference both academically and practically, because in reality the application of law is still far from expectations of justice.

Keywords: Cyber Law, ITE Law, Cyber Bullying, KUHP